

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai atau organisasi yang berideologi komunis. Marx dan Engels merupakan tokoh yang paling berperan dalam penyebaran ajaran komunis. Kemudian lebih dikenal dengan ajaran Marxisme yang muncul pada abad ke -19 sebagai tandingan ideologi kapitalisme Barat. Dalam proses perkembangan komunis tidak terlepas dari tokoh pengikut setia Marx yaitu Lenin (Adisusilo, 2007). Pada prinsipnya ajaran Marx lebih menekankan pada kekuatan ekonomi dan kelompok serta kelas daripada individu terkemuka yang beranggapan bahwa kelas buruh akan spontan untuk mengembangkan kesadaran kelasnya dalam perjuangan yang rutin guna memunculkan pemimpinnya sendiri.

Ajaran komunisme berkembang dan mendirikan negara pertama di Uni Soviet, Yugoslavia dan Cina. Ajaran Marxisme di Cina berkembang menjadi ajaran Maoisme. Sedangkan di Yugoslavia berkembang menjadi Titoisme. Keduanya sangat berbeda dengan ajaran Leninisme. Maoisme lebih menekankan pada tingkat kecurigaan terhadap pengalihan dan pemilikan basis yang memungkinkan hilangnya pemisahan kelas. Menurut Maoisme ajaran di Uni Soviet hanya menyebabkan terbentuknya elit politik baru. Sedangkan ajaran di Uni Soviet menurut Titoisme adalah konsep sosialisasi dan alat-alat produksi secara revolusionernya hanya akan membuka tahap pertama terbentuknya masyarakat komunis yaitu kapitalis (Triyanto, 1999).

PKI di Indonesia sendiri mengikuti garis Moscow sejak berdiri dengan nama *Indische Social Democratische Vereniging* (ISDV: Perserikatan Sosial Demokrat Hindia) pada tahun 1914. Sneevliet mendirikan ISDV di Surabaya. Partai kecil beraliran kiri ini dengan cepat akan menjadi partai Komunis pertama di Asia yang berada di luar negeri Uni Soviet. Menurut pernyataan Ricklefs, anggota ISDV hampir seluruhnya orang Belanda, tetapi organisasi ini memperoleh dasar di kalangan rakyat Indonesia (Ricklefs, 1992). Peneliti lain

commit to user

menambahkan, “Pada bulan Mei 1920 organisasi ini berganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia dan pada tahun 1924 berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia” (Suryanegara, 2009: 405).

PKI gagal dalam pemberontakan pertama pada tahun 1926-1927. “Pimpinan PKI di Jawa dikecam oleh Komintern dan oleh para pemimpin PKI sendiri yang berada di pengasingan” (Ricklefs, 1992: 271). Gerakan tersebut terpecah dan PKI menjadi lemah, partai berselisih tentang bagaimana seharusnya melaksanakan perjuangan, dan pada saat yang sama represi dari pemerintah kolonial meningkat (Tornquist, 2011). Para pimpinan PKI memutuskan untuk meluncurkan pemberontakan. Pemerintah berusaha menangkap sebagian besar pimpinan pusatnya pada bulan Januari 1926, tetapi banyak yang berhasil meloloskan diri (Tornquist, 2011). Salah satu pemimpin yang terkenal adalah Muso yang lari ke luar negeri.

PKI tidak dapat bangkit lagi selama hampir dua puluh tahun. “Sekitar 13.000 orang ditangkap; beberapa orang ditembak. Sekitar 4500 orang dijebloskan ke dalam penjara dan 1.308 orang dikirim ke kamp penjara yang terkenal mengerikan di Boven Digul” (Ricklefs, 1992: 272).

Kebangkitan PKI kembali, menurut Diniah, “pada tahun 1945 PKI kembali bangun sebagai organisasi legal, dengan mulai membenahi organisasinya” (2007: 64). Golongan kiri yang berada di luar pemerintahan republik memulai suatu usaha yang menimbulkan bencana untuk mendapatkan kembali kekuasaan di bawah pimpinan Amir Sjarifudin.

Suratmin menambahkan, “untuk melebarkan pengaruh dalam gerakan-gerakan kepemudaan, kader-kader PKI berhasil membentuk sebuah wadah organisasi pemuda yang bernama Pesindo” (2012: 6). Organisasi ini dimotori oleh Amir Syarifudin. Pada bulan Februari 1948 koalisi sayap kiri berganti nama menjadi FDR (Front Demokrasi Rakyat) dan mencela persetujuan Renville yang sebetulnya dirundingkan sendiri oleh pemerintahan Amir (Ricklefs, 1992). FDR sendiri adalah kelompok sayap kiri yang terdiri dari PKI, PS (Partai Sosialis), Pesindo dan Partai Buruh.

Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso pemimpin PKI pada tahun 1920-an, tiba di Yogyakarta dari Uni Soviet. Amir dan sebagian besar pemimpin Front Demokrasi Rakyat lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur segera mengakui kekuasaannya (Suratmin, 2012). Musso dengan cepat melakukan konsolidasi dengan semua gerakan sayap kiri sehingga kepengurusan FDR sepenuhnya dibawah kendali PKI.

Tiba di Indonesia, Musso melakukan provokasi yang dipaparkan dengan nama “Djalan Baru” (Poeze, 2012). Ini merupakan perubahan radikal dari sikap PKI, yaitu konfrontasi terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Bahasa Musso yang menghasut mendapat dukungan dari semua anggota PKI dan mengakibatkan ketegangan semakin memuncak, serta terpecah belahnya pendapat politik di kalangan tentara. Di Solo terjadi bentrokan sengit antara golongan militer dan politik. Kekalahan kelompok kiri di Solo menimbulkan reaksi di Madiun, sehingga terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok Komunis pada tanggal 18 September.

Peristiwa Madiun sangat penting sebagai peristiwa nasional yang berkenaan dengan revolusi Indonesia, sebab peristiwa ini merupakan revolusi sosial yang mempunyai ciri khas tersendiri. Organisasi yang dianggap paling bertanggung jawab dalam peristiwa madiun adalah PKI.

Perebutan kekuasaan di Madiun diwarnai dengan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kiri terhadap golongan anti komunis yang berusaha menghalangi pemberontakan. Aksi pembunuhan dilakukan di tempat yang sudah disediakan lubang-lubang untuk membuang jenazah korban. Maksun mengatakan lubang-lubang pembantaian sebagai *Killing holes* yang mengerikan (1990). Terdapat beberapa lokasi pembunuhan massal di Madiun dan sekitarnya. Tempat pembunuhan massal yang diketahui sampai sekarang ini yaitu: di Batokan , Pabrik Gula Rejosari, Desa Soco, Desa Cigrok dan Desa Kresek (Suratmin, 2012). Beberapa monumen untuk mengenang peristiwa revolusi di Madiun seperti Soco, Rejosari, Purworejo, Cigrok dan Kresek. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan serangkaian peristiwa yang terjadi di Madiun. Monumen yang

dibangun menampilkan gambaran sejarah revolusi Komunis di Madiun tahun 1948.

Peristiwa Madiun sering dibicarakan, namun rangkaian sejarah tentang peristiwa itu sendiri sampai sejauh ini masih belum jelas sepenuhnya. Apa yang terjadi dengan peristiwa pada tahun 1948 itu tidak banyak yang tahu. Peristiwa Madiun sendiri sebenarnya merupakan pemberontakan yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh kaum komunis di Indonesia. Sebagian tokoh penting di peristiwa tersebut adalah tokoh komunis yang pernah gagal mengadakan pemberontakan 1926.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang Pemberontakan Komunis di Madiun dengan judul "**REVOLUSI PKI MADIUN TAHUN 1948**".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana latar belakang revolusi PKI Madiun tahun 1948 ?
2. Bagaimana peristiwa revolusi PKI Madiun tahun 1948 ?
3. Bagaimana dampak peristiwa revolusi PKI Madiun tahun 1948 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang munculnya revolusi PKI Madiun tahun 1948.
2. Mengetahui peristiwa revolusi PKI Madiun. tahun 1948
3. Mengetahui dampak peristiwa revolusi PKI Madiun tahun 1948.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Memberikan pengetahuan dan informasi tentang peristiwa revolusi PKI di Madiun tahun 1948.
- b. Menambah wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang Peristiwa revolusi PKI di Madiun tahun 1948.

- c. Dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian yang sejenis secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Bagi masyarakat intelektual di lingkungan Universitas Sebelas Maret, diharapkan penelitian ini memberikan tambahan perbendaharaan wawasan tentang kajian peristiwa revolusi PKI di Madiun;
- b. Merupakan sumber referensi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang akan meneliti lebih lanjut mengenai peristiwa revolusi PKI di Madiun.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Jurusan IPS Program Studi Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.